



Tim Kejaksaan Agung meninjau lokasi pagar Kraton Kartasura yang dibongkar.

KR-Wahyu Imam Ibad

## KASUS PEMBONGKARAN PAGAR

# Kejagung Tinjau Kraton Kartasura

**SUKOHARJO (KR)** - Kejaksaan Agung (Kejagung) turun ke lapangan meninjau lokasi pagar Kraton Kartasura yang dibongkar warga di wilayah Kelurahan Kartasura Sukoharjo, Selasa (10/5). Kejagung mewawancarai sejumlah pihak untuk meminta keterangan terkait kronologis kejadian. Sebab bangunan yang dibongkar merupakan cagar budaya.

Peninjauan dipimpin Direktur Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung, Ricardo Sitinjak. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo Hadi Sulanto beserta jajarannya dan Camat Kartasura Joko Miranto.

Selain itu, hadir juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo dan Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB)

Jawa Tengah.

Kehadiran Kejagung di lokasi pembongkaran pagar Kraton Kartasura menarik minat warga sekitar. Mereka berusaha mendekat untuk mengetahui secara langsung peninjauan yang dilakukan pihak kejaksaan.

Ricardo Sitinjak mengatakan, tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk memberikan penguatan kebudayaan. "Kraton Kartasura ini cagar budaya, kami ingin memantau, mensinergikan,

berkoordinasi dengan teman-teman di daerah. Nanti hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan," jelasnya.

Ricardo Sitinjak menegaskan, sifatnya hanya mewawancarai. Nanti akan dianalisa dan bagaimana petunjuk pimpinan selanjutnya. "Ini kan pihak terkait sudah mengambil keterangan dan langkah-langkah. Kita membantu mensinergikan," lanjutnya.

Kejagung mengimbau aparat terkait turut melestarikan Kraton Kartasura yang menjadi salah satu cagar budaya. Keberadaan cagar budaya juga harus dicatatkan agar pemerintah bisa melakukan rehabilitasi atau pembiayaan untuk penguatannya.

Kajari Sukoharjo Hadi Sulanto mengatakan, pihaknya hanya

mendampingi tim Kejagung meninjau lokasi pagar Kraton Kartasura yang dibongkar. Hadi Sulanto menegaskan, kasus pembongkaran pagar Kraton Kartasura sudah ada yang melakukan penanganan.

Camat Kartasura Joko Miranto mengatakan, kejadian pembongkaran pagar Kraton Kartasura sudah menjadi perhatian pemerintah pusat. Sejumlah pihak sudah turun langsung meninjau dan melihat kondisi pagar Kraton Kartasura yang dibongkar.

Joko Miranto mengatakan, kedatangan Tim Kejagung ke lokasi pembongkaran pagar Kraton Kartasura menjadi bukti besarnya perhatian pemerintah setelah kasus ini muncul. Di-

harapkan kedepan kerusakan cagar budaya tidak lagi terjadi. (Mam)-f

## Relaksasi Perpanjangan SIM Sampai 17 Mei

**JAKARTA (KR)** - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberikan dispensasi pengurusan (relaksasi) perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi masyarakat yang masa berlaku SIM habis pada masa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, hingga Selasa (17/5) depan.

"Relaksasinya sampai tanggal 17 Mei. Kami mengharapkan masyarakat segera, yang (SIM-nya) sudah mati segera memperpanjang dari tanggal itu bisa diperpanjang sampai 17 Mei ini," kata Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus di NTMC Polri, Jakarta, Selasa (10/5).

Yusri Yunus menjelaskan, seluruh Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Korlantas Polri akan memprioritaskan pengurusan perpanjangan SIM yang masa berlakunya habis pada 29 April sampai 8 Mei.

"Kami sudah sampaikan kepada seluruh petugas di lapangan di Satpas-satpas seluruh Indonesia untuk diprioritaskan yang memang (SIM-nya) mati di tanggal 29 April-8 Mei kemarin, boleh sampai tanggal

17 Mei nanti relaksasinya," tambahnya.

Mekanisme perpanjangan SIM yang habis masa berlaku di periode tersebut sama dengan pengurusan perpanjangan SIM yang masih berlaku atau belum mati. "Untuk mekanismenya sama seperti waktu perpanjangan SIM, kami ada melalui (aplikasi) SINAR, juga bisa datang langsung ke Satpas-satpas yang ada, untuk bisa minta diperpanjang. Insya Allah sistemnya sudah kami perbaiki secara prioritas," jelasnya.

Yusri juga mengajak masyarakat untuk segera memanfaatkan waktu relaksasi perpanjangan SIM tersebut. Sebab, jika tidak diperpanjang hingga batas waktu relaksasi pada 17 Mei, maka SIM akan dianggap tidak berlaku dan harus membuat SIM baru.

"Kami mengharapkan (SIM) yang sudah mati segera, masih panjang ini waktu tanggal 9-17 Mei sekitar delapan sampai sembilan hari kerja untuk segera mungkin. Kalau lewat itu, nanti sama seperti proses biasa. Jangan sampai ketinggalan bikin baru lagi," imbaunya. (Ant/San)-f

## Erick Bakal 'Blacklist' Mitra BUMN Nakal

**JAKARTA (KR)** - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan membuat daftar hitam atau blacklist mitra-mitra BUMN yang nakal dalam rangka menciptakan ekosistem sehat. "Kerja sama BUMN dan mitra menjadi kunci, karena itu, saya nantinya akan membuat blacklist mitra-mitra yang nakal, karena saya tidak mau lagi BUMN jadi ajang korupsi, tentu capek memperbaikinya," ujar Erick Thohir di Jakarta, Selasa (10/5).

Menteri BUMN mengatakan, mitra BUMN harus memiliki kontribusi positif dalam setiap kerja sama dengan BUMN. Karenanya, Erick mengapresiasi ajang penghargaan yang menjadi apresiasi konkret dari Kementerian BUMN terhadap mitra yang selama ini telah mendukung BUMN.

"Sebelum kita menghukum, kita harus beri penghargaan. Makanya kita apresiasi mitra-mitra dengan kategori sangat bagus, tetapi kita juga memetakan atau mapping mitra-mitra yang ada kasus-kasus, supaya BUMN ikut baik, karena kalau mau jadi pemain global yang namanya transparansi dan profesional harus menjadi dasar dan proses bisnis yang benar harus dijalankan," ucap Erick.

Erick Thohir menawarkan mitra dan BUMN untuk duduk sejajar dan saling melayani dengan baik di era kolaborasi, supaya BUMN dapat menjadi pesaing global dan tidak hanya menjadi raja di kampungnya sendiri. "Ini yang ingin saya tawarkan sama-sama dan Insya Allah niat baik ini bisa disambut," lanjut Erick. (Ant/San)-d

## KENDARAAN PRIBADI DOMINASI PERGERAKAN Angka Kecelakaan Mudik-Balik Turun

**JAKARTA (KR)** - Pada penyelenggaraan mudik tahun ini, sesuai hasil survei potensi pemudik, kendaraan pribadi mendominasi pergerakan. Di sisi lain, angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan signifikan.

Tercatat, jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol yang keluar Jabodetabek pada Hari Raya Idul Fitri 2022 mengalami peningkatan 1,7 persen dibandingkan Idul Fitri 2019. Sedangkan jumlah yang masuk Jabodetabek meningkat 11,8 persen dibandingkan 2019.

"Riset kami, kendaraan pribadi mendominasi sekitar 47 persen dari total pergerakan memang terbukti dan pergerakannya ada di waktu-waktu tertentu. Jadi ini harus dikelola dengan baik," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat menutup kegiatan Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2022 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (10/5).

Meskipun penggunaan kendaraan pribadi meningkat, Menhub menjelaskan,

terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 45 persen, berdasarkan data Polri. "Penurunan kecelakaan lalin diikuti juga penurunan pemudik pengguna sepeda motor. Saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah mengikuti anjuran Pemerintah untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor, karena sangat berisiko," katanya.

Sementara pengguna angkutan umum, Menhub menyampaikan, jumlahnya relatif sama dengan tahun sebelum pandemi. Bahkan terjadi lonjakan di hari-hari tertentu, yang belum pernah terjadi sebelumnya selama pandemi. Menhub juga menuturkan, penerapan protokol kesehatan telah dijalankan dengan baik di simpul-simpul transportasi, guna mencegah terjadinya kenaikan kasus Covid-19 usai masa mudik.

Meski posko terpadu resmi ditutup, kegiatan pemantauan dan pengendalian akan tetap dilakukan mengingat perjalanan arus balik masih berlangsung, setelah adanya imbauan untuk menunda perjalanan balik. (Imd/Cry)-d

## DUGAAN PENCEMARAN NAMA BAIK

### Wakil Ketua DPRD DIY Lapor Polisi

**SLEMAN (KR)** - Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta secara resmi melaporkan lima akun sosial media ke Polda DIY, Selasa (10/5). Begitu tiba di Polda DIY, Huda didampingi kuasa hukumnya langsung menuju Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Setelah itu, Huda menuju Direktorat Reserse Kriminal Khusus sebelum melengkapi kembali laporan ke SPKT Polda DIY.

Huda melaporkan diri ke polisi, karena dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong yang disebarluaskan akun-akun tersebut tentang dirinya yang dituding berada dibalik aksi paham non Pancasila di DPRD DIY beberapa waktu lalu. Ada lima akun medsos yang dilaporkan Huda. Tiga akun instagram, @jogja.terkini, @gusti.mboten.sare dan @lentera.nkri serta dua akun Twitter @NkriLentera dan @Ronix\_Indo.

Sebelumnya, Huda telah melayangkan somasi kepada tiga akun medsos. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada respons. Bahkan, ada akun yang langsung hilang. Satu akun menyampaikan permintaan maaf.

Namun tetap tidak bisa membuktikan ungkahan mereka.

"Sebelumnya, ada tiga akun yang telah kita layangkan somasi. Namun seiring perkembangan waktu ternyata ada akun lain. Jadi total saya melaporkan lima akun ini atas dugaan pencemaran nama baik dan berita fitnah melalui akun medsos atas tuduhan saya memfasilitasi ideologi terlarang saat membacakan sikap dalam unjuk rasa di DPRD DIY," papar Huda.

Menurut Huda, pemilik akun-akun itu tidak menindaklanjuti somasi untuk membuktikan keterlibatannya dalam aksi yang mereka sebutkan. "Kami hari ini (kemarin) melaporkan atas pencemaran nama baik di medsos yang menimpa saya. Hal ini merugikan saya, jadi saya mengambil inisiatif untuk melapor," ungkap Huda.

Kuasa Hukum Huda, Kunto Wisnu Aji menambahkan, pihaknya melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong sesuai UU ITE. Ancaman hukuman atas pelanggaran pasal tersebut yakni 4 dan 6 tahun. (Awh/Bro)-f

## OPD DIY GUNAKAN PRODUK UMKM LOKAL

### Wirausaha Baru Bantu Tanggulasi Kemiskinan

**YOGYA (KR)** - Meski nilai akuntabilitas dan sejumlah prestasi sudah diraih, tidak pernah mengurangi upaya Pemda DIY untuk introspeksi dan evaluasi, salah satunya dalam menangan kemiskinan dan indeks ketimpangan yang belum berhasil diturunkan secara optimal.

"Beberapa indikator sasaran pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 belum tercapai secara optimal. Untuk itu, kualitas pelaksanaan program/kegiatan harus terus ditingkatkan. Pemda DIY harus mulai fokus pada level outcome dan pengukuran impact harus segera diupayakan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah (Rakordal) Triwulan I Tahun 2022 di Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/5).

Rakordal mengangkat tema Pemulihan Sosial Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM DIY, menghadirkan

narasumber Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki secara daring dan pengamat ekonomi dari UPN Veteran Yogyakarta Ardito Bhinadi secara luring.

Menurut Sultan, penghapusan kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan belanja bantuan sosial. Tetapi harus dibarengi pemberdayaan ekonomi rakyat, melalui pengembangan pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM). Karena itu, Sultan berharap peningkatan penumbuhan wirausaha baru di DIY sebesar 0,49 persen dapat berkontribusi positif pada capaian program Pemda DIY dalam penanggulangan kemiskinan.

"Cara berpikir fungsional inilah yang harus kita hidupkan dan kembangkan di DIY dengan strategi membangun kelompok minoritas kreatif. Selanjutnya bisa ditransformasikan menjadi kelompok mayoritas kreatif yang kaya akan produk unggul dan berkearifan lokal," terang Sultan.

Untuk memperkuat UMKM DIY,

Sultan mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder di DIY untuk bersama-sama mendukung dan menggunakan produk UMKM lokal dan produk dalam negeri. Hal ini selaras Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM dan Koperasi.

Sultan juga mengingatkan Kepala OPD agar terus menjaga kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja, sehingga bisa memperoleh hasil terbaik di akhir 2022, sebagai periode akhir dari RPJMD DIY 2017-2022.

Menkop UKM Teten Masduki mengatakan, menurunnyas kasus Covid-19 menjadi momentum tepat untuk UMKM kembali bergerak dan berkembang. Pemerintah Pusat juga terus berupaya menciptakan ekosistem usaha yang baik dan sehat dengan mengeluarkan Perpres 2/2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024. (Ria)-f

## SIDANG PN PURWOKERTO

### Permohonan Ganti Kelamin Icha Ditolak

**BANYUMAS (KR)** - Setelah permohonan ganti jenis kelamin Faqih Al Amien (29) warga Desa Jipang, Karanglegas, Banyumas, ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, Faqih yang sekarang sudah berganti nama Asyifa Icha Khairunnisa, mengajukan kasasi Mahkamah Agung (MA). "Lantaran penolakan tersebut, Faqih, mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung (MA), Senin (9/5)," kata Djoko Susanto, kuasa hukum Faqih, Selasa (10/5).

Sebelumnya pada 26 April 2022 lalu, Faqih Al Amien (29) mengajukan permohonan ganti jenis kelamin. Namun oleh hakim tunggal PN Purwokerto, yang menyidangnya ditolak.

Djoko, menjelaskan pada sidang di tingkat Pengadilan Negeri Purwokerto permohonananya dinyatakan ditolak. "Saya sedang memper-



Faqih Al Amien (29) didampingi kuasa hukumnya, Djoko Susanto.

juangkan klien saya melalui kasasi, kemarin sudah menyatakan kasasi melalui Pengadilan Negeri Purwokerto untuk diteruskan ke Mahkamah Agung," ungkapnya.

Menurut Djoko, terkait keputusan penolakan pergantian kelamin yang ditetapkan oleh hakim tunggal Villa Sari, SH MKn adalah menyalahi kodrat, Maka Icha ingin membuktikan jika dirinya merupakan se-

orang wanita, meski sejak lahir dinyatakan sebagai seorang pria.

"Alasannya menyalahi kodrat saja, itu kan tidak benar, alasan-alasan yang menurut saya kurang pas. Karena dari sisi klinis kedokteran, agama, dari sisi lingkungan, bahkan dari sisi fisik pun dia sudah menunjukkan kalau dia seorang perempuan," jelasnya.

Selain itu juga ada surat keterangan dokter dari Ru-

mah Sakit Dr Soetomo saat kliennya menjalani operasi. Surat keterangan dari rumah sakit lengkap ada semua. "Lagian sebelum dioperasi kan dicek dulu kromosomnya, gennya semua, tapi ditolak katanya karena menyalahi kodrat, padahal dokter secara klinis lebih tahu," tambahnya.

Untuk itu pihaknya sudah mengajukan kasasi pada Senin (9/5) dan berharap ada keadilan untuk kliennya. Sebelumnya ada kepastian kliennya bingung untuk bertindak, karena ia terlahir sebagai laki-laki namun memiliki fisik seorang perempuan.

Begitu pula sebaliknya, saat kliennya ingin bertindak sebagai perempuan, tapi secara administrasi ia adalah laki-laki. Termasuk saat akan melaksanakan ibadah salat, kliennya bingung bertindak secara perempuan atau laki-laki. (Dri)-d